

Perhitungan Biaya Sekolah terhadap Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Studi Komparasi pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Al-Azhar Di Kabupaten Sleman)

Harry Fadholi Lakadjo*¹, Rusdi Akbar²

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perhitungan biaya sekolah dengan analisis cost volume profit dalam menentukan break even point pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kecukupan dan kebutuhan dana bantuan operasional sekolah daerah yang diterima pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah dari masing-masing SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dan data sekunder yang didapatkan melalui dokumen lembar validasi pertanggungjawaban dana BOS reguler, dana BOSDA, dan dokumen lainnya yang sah pada tahun 2022. Temuan penelitian dari hasil perhitungan biaya yang dilakukan bahwa break even point pada SMP Negeri 4 Pakem sebesar Rp788.205.764 dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sebesar Rp9.708.375.55. Penerimaan dana BOSDA untuk SMP Negeri 4 Pakem dinilai masih kurang untuk membiayai 8 standar nasional pendidikan, sedangkan untuk SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dinilai sudah cukup untuk membiayai program dan kegiatan sekolah. Selain itu, dalam proses perhitungan biaya terbagi dalam tiga tahapan, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan. Kontribusi penelitian ini adalah dapat menambah literatur dan pemahaman bagi kepala sekolah dan bendahara untuk melakukan perhitungan biaya sekolah yang cermat.

Kata Kunci: *Break even point, cost volume profit, dana BOSDA, perhitungan biaya sekola*

Pendahuluan

Dunia pendidikan tidak terlepas dari komponen pembiayaan yang berfungsi untuk menunjang jalannya sistem pendidikan (Prihatin *et al.*, 2022). Pembiayaan pada sektor pendidikan bukan hanya terkait pendidikan itu dibiayai, tetapi ketersediaan dan pengalokasian anggaran menjadi penting untuk diperhatikan (Handayani & Sukirno, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia mengamanatkan wajib mengikuti pendidikan dasar selama sembilan tahun. Sebagai keseriusan mengoptimalkan wajib belajar sembilan tahun, pemerintah mengadakan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Hadiyanto *et al.*, 2019). Tujuan khusus dari dana BOS untuk membebaskan pungutan kepada setiap siswa (Hadiyanto *et al.*, 2019). Namun, menurut Sugihartono (2022) di Jawa Tengah masih terjadi pungutan liar di beberapa wilayah seperti Kabupaten Purworejo dan Kabupaten

Magelang. Kasus yang sama ditemukan di Jawa Timur bahwa terjadi pungutan untuk biaya seragam sekolah mencapai Rp2,34 juta (Kompas, 2023).

Sumber pendanaan program BOS sebenarnya dapat dibedakan menjadi BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan BOS dari pemerintah kota/kabupaten atau yang disebut BOS daerah (BOSDA) (Hadiyanto *et al.*, 2019). Menurut Basuni & Halim (2023), munculnya program BOSDA menuntut pemerintah daerah untuk melengkapi kekurangan pembiayaan dana BOS dari pemerintah pusat. Namun, menurut Aflaha *et al.*, (2021) menyatakan dampak dari pelimpahan kebijakan tentang pendidikan kepada pemerintah daerah membuat para pemangku kebijakan kesulitan dalam menghitung komponen biaya pendidikan yang bisa berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan.

Dalam perhitungan biaya, Anhari *et al.*, (2020) menyebutkan dengan menggunakan informasi rincian biaya bisa memperkirakan kebutuhan anggaran untuk sekolah. Informasi rincian biaya yang akurat bisa dilakukan dengan menggunakan metode *variable costing* yang memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Gean & Gean (2015) salah satu metode untuk melakukan perhitungan

biaya dengan memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel adalah analisis *cost volume profit* (CVP). Dasar pemikiran dari analisis CVP ini untuk melihat reaksi dan hubungan antara aktivitas, biaya, volume, dan keuntungan yang informasi antara variabel ini dapat berguna untuk pengambilan keputusan.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak hanya diurus dari pihak pemerintah, tetapi melibatkan pihak swasta. Menurut Zancajo *et al.*, (2022) sekolah swasta yang memperoleh dana dari bantuan pemerintah dapat memicu dinamika persaingan dengan sekolah negeri. Maka dari itu, perhitungan biaya sekolah penting dilakukan untuk sekolah negeri dan swasta agar lebih mengedepankan aspek keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Menurut Hayatunnida & Shaleh (2022) salah satu daerah yang bisa dijadikan *pilot project* pendidikan dari sisi pembiayaan dan administrasi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemdikbud, saat ini DIY memiliki jumlah sekolah sebanyak 7.771 dengan pembagian 1.824 sekolah negeri dan 5947 sekolah swasta. Khusus untuk Kabupaten Sleman dana BOS reguler tahun 2022 sebesar Rp182.357.400.317, pada tahun 2021 Rp186.312.872.000 dan pada tahun 2020 Rp184.106.750.000. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di DIY, Kabupaten Sleman sebagai penerima BOS reguler terbesar (Kemdikbud, 2022) dan memperoleh tambahan dana BOSDA berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2022.

SMP Negeri 4 Pakem salah satu sekolah negeri di Kabupaten Sleman yang dinilai sebagai sekolah favorit oleh masyarakat karena memiliki keunggulan dan terakreditasi A dari Kemdikbud, tetapi secara pendapatan hanya terbatas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan sekolah swasta favorit di masyarakat, SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta merupakan sekolah islam terkenal di Yogyakarta dengan akreditasi A dari Kemdikbud, namun secara sumber pendapatan memperoleh Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari setiap siswa dan terbuka peluang menerima tambahan dana

BOSDA melalui mekanisme hibah yang diatur dalam Perbup Sleman Nomor 24 Tahun 2022.

Pembiayaan pendidikan untuk sekolah negeri dan swasta memang menjadi tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi, secara peraturan perundang-undangan, kedua sekolah ini berhak mendapat dana yang bersumber dari pemerintah, namun untuk mewujudkan BOSDA yang berkeadilan, pemerintah Kabupaten Sleman harus memperhatikan alokasi dana BOSDA berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah. Dengan demikian, cara untuk memperhatikan kecukupan dan kebutuhan dana untuk sekolah dengan melakukan analisis perhitungan biaya sekolah untuk menentukan *break even point* pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta agar dana BOSDA yang diterima dinilai kurang atau cukup untuk membiayai kebutuhan dari masing-masing sekolah.

Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori Institusional Teori

Institusional teori atau teori kelembagaan pertama kali dikenalkan oleh DiMaggio, P.J. and Powell, W.W. tahun 1983. Teori ini menjelaskan bahwa konsep yang diterapkan oleh satu organisasi cenderung sama dengan organisasi yang berbeda. Menurut Scott (1995), teori kelembagaan merupakan teori sosiologi yang menjelaskan struktur organisasi. Dalam teori ini, suatu organisasi mengadopsi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan administrasinya, tetapi masih sesuai dengan kode etik suatu organisasi yang kemudian bisa mengarah pada legitimasi dan dukungan eksternal dari organisasi (DiMaggio & Powell, 1983). Seiring perkembangan zaman, organisasi yang sudah dikatakan mapan dalam pengelolaannya, cenderung mengarah pada keseragaman (Sofyani et al., 2018). Istilah yang tepat untuk menggambarkan proses dari keseragaman organisasi adalah isomorfisme (Ahyaruddin & Akbar, 2018).

Menurut DiMaggio & Powell (1983) menjelaskan konsep isomorfisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: isomorfisme kompetitif dan isomorfisme institusional. Isomorfisme kompetitif terkait dengan efisiensi, ketika organisasi bersaing, mereka lebih cenderung memakai cara yang lebih murah, lebih baik, dan efisien untuk kepentingan kompetisi (Ahyaruddin & Akbar, 2018). Isomorfisme institusional merupakan alat yang digunakan untuk menunjang

pemahaman tentang politik serta prosedur dalam kehidupan berorganisasi (Sofyani et al., 2018). DiMaggio & Powell (1983) mengidentifikasi terdapat tiga isomorfisme institusional, yaitu: isomorfisme koersif, mimetik, dan normatif.

- 1) Isomorfisme koersif terjadi ketika pihak eksternal memberikan tekanan pada organisasi dengan cara mengadopsi keyakinan yang sama dengan organisasi lain untuk mempertahankan legitimasi atau agar dianggap sebagai organisasi yang efektif dalam memenuhi tugasnya (Sofyani et al., 2018). Bentuk tekanan yang dialami seperti paksaan, bujukan, ajakan untuk bergabung dalam kolusi.
- 2) Isomorfisme mimetik terjadi ketika organisasi mengadopsi atau meniru praktik-praktik yang dilakukan dari organisasi yang dianggap sukses dan dibuktikan dengan rekam jejak serta pencapaiannya (Sofyani et al., 2018). Peniruan dapat terjadi berdasarkan informasi di antara karyawan atau melalui rekomendasi dari konsultan yang dipilih oleh organisasi tersebut.
- 3) Isomorfisme normatif terjadi ketika sebuah organisasi mengadopsi nilai-nilai atau norma yang sama dengan organisasi lain dalam lingkungan yang sama untuk mengembangkan profesionalismenya (Sofyani et al., 2018).

Cost Volume Profit

Cost volume profit (CVP) merupakan bagian dari perhitungan *unit cost* dalam akuntansi manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi (Lulaj & Iseni, 2018). Menurut Gean & Gean (2015) analisis CVP suatu metode untuk menangkap reaksi dan hubungan antara biaya, volume, dan keuntungan. Analisis CVP salah satu cara yang paling efektif dalam memperkirakan biaya, merealisasikan target laba, dan menganalisis keputusan perusahaan (LE et al., 2020). Tujuan dari analisis CVP adalah untuk menentukan output yang menambah nilai bisnis, menekan dampak dari biaya tetap, titik impas, serta target keuntungan

yang bisa menentukan volume penjualan dan perkiraan pendapatan (LE et al., 2020).

Menurut Purwanto & Watini (2020) biaya merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu yang memberikan manfaat pada masa kini dan masa yang akan datang. Dalam analisis CVP, biaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya tetap dan biaya

variabel (DALCI, 2005). Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume penjualan, sebaliknya, biaya variabel merupakan biaya yang bisa berubah seiring dengan perubahan volume penjualan (Phillips, 1994).

Menurut F. D. Putra (2017) volume penjualan merupakan total dari hasil penjualan yang dicapai oleh suatu unit bisnis dalam periode tertentu. Dalam analisis CVP, volume penjualan merupakan satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi biaya variabel dan pendapatan. Menurut Hassanah & Daud (2019) laba merupakan selisih antara total penghasilan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan pada suatu kegiatan usaha, sehingga laba dalam analisis CVP merupakan total penjualan dikurangi dengan total biaya. Hubungan antara biaya, volume, dan laba dalam analisis CVP dapat digunakan untuk menghitung *break event point*, komposisi biaya untuk memaksimalkan margin kontribusi yang tujuannya mengantisipasi kerugian dari unit usaha.

Break Even Point

Analisis CVP dapat didefinisikan dalam istilah yang lebih sempit, yaitu berkaitan dengan cara menghitung *break event point* atau titik impas (Abdullahi *et al.*, 2017). Titik impas adalah keadaan operasional perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian (Bastomi *et al.*, 2021). Dengan kata lain, titik impas hanya bisa menutupi semua biaya tanpa membuat suatu keuntungan (Abdullahi *et al.*, 2017).

Perhitungan *break event point* merupakan inti dari analisis CVP yang berguna mencapai tingkat volume yang diperlukan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. Untuk melengkapi perhitungan *break even point*, perhitungan *margin of safety* (MoS) juga penting dilakukan agar bisa mengetahui presentase penurunan pendapatan maksimum harus berada pada taraf tertentu atas hasil dari penjualan suatu produk (Devi *et al.*, 2023).

Perhitungan *break event point* dan *margin of safety* dapat dihitung menggunakan rumus (Bastomi *et al.*, 2021):

Break-even point in unit:

$$\frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Selling Price per Unit} - \text{Variable Cost per Unit}}$$

Break-event poin in rupiah:

$$\frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Contribution Margin Ratio}}$$

Margin Of Safety in rupiah:

$$\text{Current sales} - \text{Sales Reached BEP Rp}$$

MoS percentage:

$$\frac{\text{Margin Of Safety}}{\text{Sales}}$$

Menurut Osahon & Ph (2014) salah satu pendekatan untuk menentukan *break event point* adalah pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan selisih antara total pendapatan dan total biaya variabel. Margin kontribusi merupakan konsep dalam analisis CVP yang berkontribusi terhadap laba bersih setelah biaya tetap tertutupi (DALCI, 2005).

Selanjutnya, dalam menentukan rasio margin kontribusi dapat dihitung dengan margin kontribusi dibagi dengan total pendapatan. Penentuan rasio margin kontribusi berfungsi sebagai presentase dari besaran margin kontribusi untuk menutupi biaya tetap serta bagian dari rumus untuk mencari titik impas dalam satuan rupiah. Pendekatan margin kontribusi dapat dihitung menggunakan rumus:

Contribution Margin:

$$\frac{(\text{selling price} - \text{variable cost per unit}) \times \text{quantity sold}}{\text{Total revenue} - \text{total variable cost}}$$

Contribution Margin per Unit:

$$\text{Variable cost per unit} - \text{selling price}$$

Margin Contribution Ratio:

$$\frac{\text{Contribution Margin}}{\text{Total Revenue}}$$

Penggunaan analisis *cost volume profit* pada penelitian ini penekanannya lebih pada cara menghitung biaya sekolah dengan pendekatan margin kontribusi dan dibandingkan dengan dana BOSDA yang diterima dari masing-masing sekolah. Ketika informasi biaya bisa diidentifikasi dengan baik sehingga bisa menentukan titik impas, maka sekolah bisa merencanakan anggaran sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan anggaran yang akan diterima dari dana BOSDA.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

(BOSDA)

Dana BOS di Indonesia dinilai mampu menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun bagi anak-anak (Hadiyanto *et al.*, 2019). Seiring dengan berjalannya program BOS, Akbar (2016) menyatakan program BOS yang dijalankan oleh pemerintah dinilai belum efektif karena masih mengalami masalah seperti pencairan dana yang terlambat, penyelewengan dana, dan belum maksimalnya penyaluran dana BOS, namun (Andi *et al.*, 2015) menilai program BOS masih dijalankan karena dianggap signifikan dalam membantu penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada Pasal 81 anggaran pendidikan dari APBD sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja daerah. Sebagai perwujudan alokasi anggaran pendidikan 20% untuk setiap daerah, pemerintah daerah dapat menjadikan dana BOS daerah (BOSDA) sebagai program yang menunjang urusan penyelenggaraan pendidikan 20% sesuai dengan kemampuan daerah. Menurut Suheni *et al.*, (2018) tujuan dari dana BOSDA hanya untuk memenuhi kebutuhan pelaku pendidikan agar merasa puas dengan kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan.

Pengelolaan dana BOSDA merupakan proses pengelolaan keuangan yang ideal, dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan (Anugrah *et al.*, 2022). Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Adanya kewenangan bagi pemerintah daerah mengadakan program BOSDA mengakibatkan campur tangan pemerintah pusat menurun jika diikuti dengan kemandirian sekolah dalam manajemen yang baik (S. Rahayu *et al.*, 2015).

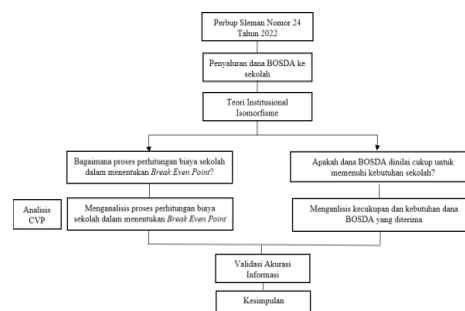
Selain itu, otonomi sekolah dianggap dapat merubah tujuan dari pendidikan, karena dianggap pendidikan ada unsur politis (S. Rahayu *et al.*, 2015). Menurut (Broadbent & Laughlin, 1998) pendidikan tidak lagi dinilai dari prosesnya, melainkan dinilai dari sisi pengelolaan keuangan dan laporan hasil akhir siswa.

Berdasarkan objek penelitian di daerah

kabupaten Sleman, pemda Sleman membuat Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 tahun 2022 tentang dana BOSDA. Peraturan ini lebih menekankan penyaluran dana BOSDA pada jenjang pendidikan dasar yaitu, SD, Madrasah Ibtida'iyah, SMP, dan Madrasah Tsanawiyah. Pada jenjang pendidikan dasar negeri bertujuan membebaskan pembiayaan pendidikan pada peserta didik, sedangkan pada jenjang pendidikan dasar untuk swasta bertujuan membantu pembiayaan operasional sekolah untuk meringankan biaya bagi peserta didik.

Rerangka Konseptual

Penerapan analisis perhitungan biaya pada sekolah negeri dan swasta penting dilakukan agar pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan bisa dikelola secara efektif. Apabila penerapan analisis biaya di sekolah diterapkan dengan baik, pemerintah daerah sebagai pemberi dana BOSDA bisa melihat kebutuhan anggaran yang diperlukan dari sisi pengeluaran sekolah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan metode analisis *cost volume profit* dalam menentukan *break even point* di sekolah digunakan untuk melihat hubungan antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima. Gambar 2.1 merupakan rerangka konseptual dari penelitian ini.



Gambar 1. Rerangka Konseptual

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2014) metode kualitatif adalah sebuah rancangan untuk mendapatkan pemahaman permasalahan dari beberapa individu atau sekelompok orang. Penelitian ini berfokus pada perhitungan biaya sekolah dengan menggunakan analisis *cost volume profit* dalam menentukan *break even point* terhadap penerimaan dana BOSDA pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta di Kabupaten Sleman.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan melalui objek penelitian dengan wawancara semi terstruktur kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung untuk mendukung data primer terkait laporan realisasi penggunaan anggaran sekolah yaitu lembar validasi pertanggung jawaban dana BOS reguler dan dana BOSDA tahun 2022.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu teknik analisis *cost volume profit* (CVP) yang digunakan untuk menghitung *break event point* dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis dengan metode CVP pada penelitian ini digunakan untuk menghitung *break event point* dari masing-masing SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Menurut (Sholekhah *et al.*, 2018) bagian penting dari analisis CVP adalah penentuan titik impas. Tahapan dari analisis CVP, diantaranya yaitu (1) mengidentifikasi dan menghitung total pendapatan, (2) mengidentifikasi biaya yang terjadi, (3) mengelompokkan biaya berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel, (4) menghitung margin kontribusi, dan (5) menghitung *break even point* dan *margin of safety*. Pada tahap analisis data kualitatif, menurut (Hennink *et al.*, 2020) menyatakan siklus analitis terbagi dalam 6 tahap, yakni (1) pengembangan kode, (2) deskripsi data, (3) perbandingan, (4) kategorisasi, (5) konseptualisasi, dan (6) pengembangan teori. Teknik pengujian validitas data yang dilakukan dalam penelitian adalah triangulasi dan *memberchecking*. sedangkan uji reliabilitas kualitatif dilakukan dengan mendokumentasikan prosedur penelitian secara rinci.

Hasil Dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara mendalam kepada responden yang terkait langsung dengan perhitungan biaya sekolah dan penerima dana BOSDA di SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah

yang berperan dalam tugas dan fungsi sebagai pembuat keputusan untuk penggunaan dana BOS reguler dan BOS Daerah dan Bendahara Sekolah yang berperan dalam tugas dan fungsi pencatatan, perhitungan biaya sekolah, hingga pelaporan dana BOS reguler yang diterima dari pemerintah pusat dan dana BOS Daerah yang diterima dari pemerintah daerah.

Selain data primer, data sekunder juga dikumpulkan untuk menghitung *break event point* atau titik impas dari SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dengan menggunakan analisis *cost volume profit*. Adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah data historis dari laporan pertanggungjawaban dana BOS reguler dan dana BOS daerah Kabupaten Sleman tahun 2022 untuk masing-masing SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta mengumpulkan data tambahan berupa data Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) yang sumbernya berasal dari iuran per siswa.

Cost Volume Profit dalam Menentukan Break Even Point pada SMP Negeri 4 Pakem

1) Identifikasi dan menghitung total pendapatan
Sumber pendapatan yang diterima oleh SMP Negeri 4 Pakem dengan jumlah siswa 478 berasal dari (1) pemerintah pusat berupa dana BOS reguler pada tahun 2022 sebesar Rp522.890.226 dan (2) dari pemerintah daerah berupa dana BOS daerah sebesar Rp266.955.000 serta dari (3) orang tua/wali murid berupa sumbangan sukarela. Informasi besaran dana sumbangan sukarela tidak dapat diperoleh karena SMP Negeri 4 Pakem tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait dana sumbangan sukarela. Jadi total keseluruhan

pendapatan SMP Negeri 4 Pakem yang diperoleh sebesar Rp789.845.226.

2) Identifikasi dan pengelompokan biaya
Informasi terkait biaya yang terjadi di SMP Negeri 4 Pakem diperoleh langsung melalui data sekunder dalam bentuk lembar validasi pertanggungjawaban dana BOS reguler dan dana BOS daerah tahun 2022. Biaya yang terjadi pada SMP Negeri 4 Pakem diklasifikasi menjadi lima bagian, yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja persediaan, (3) belanja barang dan jasa, (4) belanja modal peralatan dan mesin, dan (5) belanja aset tetap lainnya. Berikut tabel pengelompokan jumlah biaya tetap dan biaya variabel

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

berdasarkan rekapitulasi biaya yang terjadi.

Tabel 1. Pengelompokan Biaya SMP Negeri 4 Pakem

Rekapitulasi biaya	Biaya tetap	Biaya variabel
Belanja pegawai	Rp14.000.0000	
Belanja persediaan	Rp2.853.000	Rp52.869.093
Belanja barang dan jasa	Rp434.248.192	Rp91.607.078
Belanja modal peralatan dan mesin	Rp1.000.036	Rp134.440.828
Belanja aset tetap lainnya		Rp57.485.800
	Rp452.501.228	Rp336.402.799
Total Biaya	Rp788.904.027	

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, total biaya yang terjadi di SMP Negeri 4 Pakem sebesar Rp Rp788.904.027 dengan biaya tetap Rp452.501.228 dan biaya variabel Rp Rp336.402.799.

3) Perhitungan margin kontribusi

Pada tahap ini, tidak hanya menghitung margin kontribusi saja, melainkan menghitung margin kontribusi per siswa dan rasio margin kontribusi.

a) Margin kontribusi:

$$\begin{aligned} &\text{total pendapatan} - \text{total biaya variabel} \\ &\text{Rp789.845.226} - \text{Rp336.402.799} \\ &= \text{Rp453.442.427} \end{aligned}$$

b) Margin kontribusi per siswa:

$$\begin{aligned} &\frac{\text{margin kontribusi}}{\text{jumlah siswa}} \\ &\frac{\text{Rp453.442.427}}{478} = \text{Rp948.624} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) Rasio margin kontribusi:} & \quad \frac{\text{margin kontribusi}}{\text{total pendapatan}} \\
 & \quad \frac{\text{Rp453.442.42}}{\text{Rp789.845.22}} = 0,57 \\
 & \quad \frac{7}{6}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) MoS Rp} & \quad = \text{current sales-BEP Rp} \\
 & \quad = \text{Rp789.845.226} - \\
 & \quad \text{Rp788.904.027} \\
 & \quad = \text{Rp1.639.461}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, angka dari margin kontribusi sebesar Rp453.442.427 ini menandakan bahwa perolehan pendapatan sekolah mampu menutupi biaya-biaya variabel, untuk angka dari margin kontribusi per siswa sebesar Rp948.624 menunjukkan bahwa biaya-biaya yang sifatnya berhubungan langsung dengan jumlah siswa masih lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan per siswa yang diterima, sedangkan untuk angka dari rasio margin kontribusi sebesar 0,57 menandakan bahwa 57% dari total pendapatan mampu menutupi total biaya tetap yang ada di SMP Negeri 4 Pakem.

- 4) *Break even point dan margin of safety*
Dalam analisis *cost volume profit*, tahap terakhir dan terpenting adalah menentukan *break even point* (BEP) dari SMP Negeri 4 Pakem. Penentuan *break even point* dibagi menjadi dua, *break even point* in siswa dan *break even point* in rupiah, sedangkan perhitungan *margin of safety* (MoS) berguna untuk menentukan bahwa batas aman dari penurunan pendapatan

$$\begin{aligned}
 \text{a) BEP siswa} & \quad = \\
 & \quad \frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Contribution Margin/Unit}} \\
 & \quad = \frac{\text{Rp452.501.228}}{\text{Rp948.624}} \\
 & \quad = 477
 \end{aligned}$$

Jika SMP Negeri 4 Pakem ingin mengalami kondisi impas, jumlah siswa yang harus dimiliki sebanyak 477 siswa. Jika dibandingkan dengan kondisi jumlah siswa sesungguhnya berada pada jumlah 478 siswa.

$$\begin{aligned}
 \text{b) BEP Rp} & \quad = \\
 & \quad \frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Contribution Margin Ratio}} \\
 & \quad = \frac{\text{Rp452.501.228}}{0,57} \\
 & \quad = \text{Rp788.205.764}
 \end{aligned}$$

Jika SMP Negeri 4 Pakem ingin

mengalami kondisi impas, total pendapatan yang harus diperoleh adalah Rp788.205.764. Jika dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya, total pendapatan sebesar Rp789.845.226.

Jadi, hasil perhitungan MoS memberikan rencana besaran pendapatan yang dapat mengalami penurunan maksimum sebesar Rp1.639.461, tetapi angka ini belum memperhitungkan realisasi dana komite yang bisa berpengaruh terhadap proses analisis *break even point*.

Cost Volume Profit Dalam Menentukan Break Even Point pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta

- 1) Identifikasi dan menghitung total pendapatan
Sumber pendapatan yang diterima SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dengan jumlah siswa 391 siswa untuk tahun 2022 terdiri dari (1) paket pendukung kegiatan pembelajaran (PPKP) sebesar Rp3.680.150.000, (2) iuran OSIS Rp126.920.000, (3) iuran jamiyyah Rp95.750.000, (4) iuran bulanan Rp6.334.200.000, dan (5) BOS Reguler dan (6) BOS Daerah Rp212.160.000. jadi total keseluruhan pendapatan yang diterima oleh SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sebesar Rp10.904.580.000.
- 2) Identifikasi dan pengelompokan biaya Informasi biaya yang terjadi pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dapat diidentifikasi berdasarkan iuran yang dipungut dari setiap siswa yaitu, (1) Paket Pendukung Kegiatan Pembelajaran (PPKP), (2) iuran OSIS, (3) iuran jamiyyah, dan (4) iuran bulanan, serta biaya yang terjadi berdasarkan (5) BOS reguler dan (6) BOS daerah tahun 2022. Berikut tabel pengelompokan jumlah biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan rekapitulasi biaya yang terjadi.

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

Tabel 2. Pengelompokan Biaya SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta

Rekapitulasi biaya	Biaya tetap	Biaya variabel
Iuran PPKP dan OSIS	Rp2.564.274.000	Rp317.730.000
Iuran jamiyyah	Rp5.000.000	Rp85.100.000
Iuran bulanan	Rp6.334.200.000	
Belanja pegawai	Rp9.300.000	
Belanja barang dan jasa	Rp233.598.246	Rp181.587.541
Belanja modal	Rp1.650.000	Rp321.783.844
	Rp6.901.478.246	Rp3.152.745.385
Total Biaya	Rp10.054.223.631	

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, total biaya yang terjadi di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sebesar Rp10.054.223.631 dengan biaya tetap Rp6.901.478.246 dan biaya variabel Rp3.152.745.385.

3) Perhitungan margin kontribusi

a) Margin kontribusi:
 total pendapatan - total biaya variabel
 Rp10.904.580.000 -
 Rp3.152.745.385
 =
 Rp7.751.834.615

b) Margin kontribusi per siswa:

$$\frac{\text{margin kontribusi}}{\text{jumlah siswa}} = \frac{Rp7.751.834.615}{391} = Rp19.825.664$$

c) Rasio margin kontribusi:

$$\frac{\text{margin kontribusi}}{\text{total pendapatan}} = \frac{Rp7.751.834.615}{Rp10.904.580.000} = 0,71$$

jumlah siswa, sedangkan untuk angka dari rasio margin kontribusi sebesar 0,71 menandakan bahwa 71% dari total pendapatan sekolah mampu menutupi biaya tetap yang ada di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta.

4) Break even point dan margin of safety

a)
$$\text{BEP siswa} = \frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Contribution Margin/Unit}} = \frac{Rp6.901.478.246}{Rp19.825.664} = 348$$

Jika SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta ingin mengalami kondisi impas, jumlah siswa yang harus dimiliki hanya sebanyak 348 siswa. Jika dibandingkan dengan kondisi sesungguhnya, jumlah siswa SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sebanyak 391 siswa, artinya angka ini sudah melewati batas impas dari yang dibutuhkan.

b)
$$\text{BEP Rp} = \frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Contribution Margin Ratio}} = \frac{Rp6.901.478.246}{0,71} = Rp9.708.375.551$$

Jika SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta ingin mengalami kondisi impas, total pendapatan hanya sebesar Rp9.708.375.551. Jika dibandingkan dengan kondisi pendapatan yang sesungguhnya sebesar Rp10.904.580.000, artinya perolehan angka titik impas ini menunjukkan bahwa SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sudah mencapai pendapatan di atas titik impas.

c)
$$\text{MoS Rp} = \text{current sales} - \text{BEP Rp} = Rp10.904.580.000 - Rp9.708.375.551 = Rp1.196.204.449$$

Jadi, hasil perhitungan MoS memberikan

rencana besaran pendapatan yang dapat mengalami penurunan maksimum sebesar

Berdasarkan hasil perhitungan, angka dari margin kontribusi sebesar Rp7.751.834.615 ini menandakan bahwa perolehan pendapatan sekolah dikatakan mampu menutupi biaya-biaya variabel yang dikeluarkan berdasarkan pendapatan dari iuran PPKP, iuran OSIS, iuran *jamiyyah*, serta BOS reguler dan BOS daerah, untuk angka dari margin kontribusi per siswa sebesar Rp19.825.664 menunjukkan biaya-biaya yang sifatnya berhubungan langsung dengan Rp1.196.204.449 atau 11% dari total pendapatan sesungguhnya.

Proses Perhitungan Biaya Sekolah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2022 telah diuraikan tentang proses penggunaan dana BOSDA oleh SMP negeri dan swasta. Aktivitas tersebut diantaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungjawaban, hingga monitoring dan evaluasi. Penelitian ini berfokus pada proses perhitungan biaya sekolah untuk menentukan *break even point* dari masing-masing sekolah dengan analisis *cost volume profit*. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden, proses perhitungan biaya sekolah dilakukan berdasarkan tiga tahap, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan.

- 1) Pada proses perencanaan biaya, SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta merencanakan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berarti sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
- 2) Pada proses pengelolaan biaya, SMP Negeri 4 Pakem mengeluarkan biaya yang bersumber dari dana BOSDA berdasarkan klasifikasi biaya 8 standar nasional pendidikan (SNP). Selain itu, penggunaan dana BOSDA dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan dana BOS reguler. Pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta penggunaan dana BOSDA sama seperti SMP Negeri 4 Pakem berdasarkan 8 SNP, namun penggunaan dana yang bersumber dari dana iuran didasarkan pada klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan yang direncanakan. Selain itu, penggunaan dana iuran ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan dana BOSDA.
- 3) Pada proses pelaporan biaya, SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26

Yogyakarta membuat lembar validasi pertanggungjawaban dana BOSDA berdasarkan 8 SNP dan diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Namun, masalah yang terjadi di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta pada saat pelaporan sering mengalami keterlambatan pemberian dana BOSDA.

Kebutuhan dan Kecukupan Dana BOSDA

Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis *cost volume profit*, perolehan *break even point* di SMP Negeri 4 Pakem yaitu sebesar 477 siswa dan Rp788.205.764. Angka ini menunjukkan jika SMP Negeri 4 Pakem ingin mengalami kondisi tidak kekurangan atau tidak kelebihan dana untuk membiayai sekolahnya, jumlah siswanya harus 477 dan total pendapatannya Rp788.205.764. Namun, perolehan *break even point* ini belum memperhitungkan biaya yang timbul berdasarkan sumber pendapatan yang berasal

dari orang tua yaitu sumbangan sukarela atau dana komite. Dengan kata lain, analisis CVP dalam menentukan *break even point* pada SMP Negeri 4 Pakem belum memperhitungkan dana komite.

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, pendanaan dari dana komite dinilai adanya unsur ketidakpastian. Dari sisi waktu dan nominal tidak bisa ditentukan oleh pihak sekolah serta dari pihak sekolah tidak bisa melakukan penagihan kepada wali murid. Sehingga, berdasarkan tambahan data wawancara pada SMP Negeri 4 Pakem, dana BOSDA yang diberikan dinilai kurang untuk membiayai sekolah. Dampak dari dana BOSDA yang dinilai kurang dirasakan oleh SMP Negeri 4 Pakem pada pembayaran gaji guru honorer. Pasalnya, pembiayaan untuk gaji guru honorer banyak di biayai dari dana BOSDA, namun karena kurangnya dana yang dimiliki mengakibatkan sekolah kesulitan untuk membayar hak dari gaji guru honorer tersebut.

Pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta diperoleh hasil perhitungan titik impas yaitu 348 siswa dan Rp9.708.375.551. Hasil dari angka ini sudah memuat keseluruhan data yang dibutuhkan. Jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp10.904.580.000, angka ini sudah melewati dari kebutuhan biaya yang dibutuhkan. Bahkan ketika dikurangi dengan penerimaan dana BOSDA, SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta masih dikategorikan mampu untuk membiayai sekolahnya. Kepala sekolah SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sudah melakukan diskusi dengan para wali murid sebagai donator tetap untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan sekolah, SMP Islam Al-Azhar

26 Yogyakarta tidak merasa terbebani terhadap pembiayaan yang akan dilakukan selama periode satu tahun anggaran. Oleh karena itu, kebutuhan dan kecukupan dana BOSDA yang diterima oleh SMP Islam Al- Azhar 26 Yogyakarta dinilai cukup dan membantu untuk membiayai sekolah.

Pengembangan Teori

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa dari kedua sekolah SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta terdapat isomorfisme koersif dan isomorfisme normatif, sedangkan

untuk isomorfisme mimetik peneliti tidak memperoleh hasil yang konkrit karena perhitungan biaya sekolah didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah yang artinya sekolah diberikan hak untuk melakukan perhitungan biaya dari perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah.

Perhitungan biaya sekolah di SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), namun dalam prinsip MBS ini kedua sekolah ini tetap menyesuaikan aturan yang ditentukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Aturan yang diberikan oleh Kabupaten Sleman yaitu, mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 47.2/Kep.KDH/A/2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHBJ) Tahun Anggaran 2022. Juknis dan SHBJ ini yang menjadi pedoman bagi SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta untuk melakukan proses perhitungan biaya.

Selain isomorfisme koersif yang terjadi pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta, terdapat juga isomorfisme normatif pada kedua sekolah ini. isomorfisme yang terjadi pada kedua sekolah ini adalah pelatihan dari Dinas Pendidikan terkait pengelolaan dana BOSDA. Pelatihan ini ditujukan kepada masing-masing bendahara sekolah atau kepala sekolah sebagai penerima dan pengelola dana BOSDA. Pelatihan ini diikuti oleh sebagai bentuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia agar kapabilitas

dari profesionalismenya meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Hasil perhitungan biaya dengan menggunakan analisis CVP pada SMP Negeri 4 Pakem memperoleh *break even point* sebesar 477 siswa dan Rp788.205.764, sedangkan pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta memperoleh *break even point* sebesar 348 siswa dan Rp9.708.375.551. Namun, berdasarkan hasil analisis data kualitatif penerimaan dana BOSDA dinilai berbeda oleh SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar

26 Yogyakarta dari sisi kecukupan dan kebutuhannya. Pada SMP Negeri 4 Pakem dana BOSDA yang diterima dinilai “belum” mencukupi untuk membiayai kebutuhan sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan, sedangkan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta penerimaan dana BOSDA dinilai sebagai “pelengkap (membantu)” pembiayaan yang ada di sekolah dari sisi 8 standar nasional pendidikan maupun program dan kegiatan.

Selain itu, pada proses perhitungan biaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta terjadi berdasarkan tiga tahapan, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan. (1) Tahap perencanaan, biaya yang akan dikeluarkan untuk satu tahun anggaran berdasarkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. (2) tahap pengelolaan, proses perhitungan biaya disesuaikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan dan kegiatan yang direncanakan. (3) tahap pelaporan, akhir dari proses perhitungan biaya untuk penggunaan dana BOSDA yang digunakan kemudian dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk lembar validasi pertanggungjawaban.

Keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini adalah tidak mendapatkan dokumen penting, yakni laporan pertanggungjawaban dana komite dari SMP Negeri 4 Pakem sehingga hasil perhitungan yang dilakukan belum mencakup keseluruhan data yang ada. Namun, dengan tambahan dari wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah dan bendahara SMP Negeri 4 Pakem yang menekankan bahwa dana BOSDA di sekolah ini masih terasa kurang, hal ini membuat peneliti yakin terhadap justifikasi yang dilakukan bahwa penerimaan dana BOSDA di SMP Negeri 4 Pakem masih kurang. Selain itu, penelitian ini hanya melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta selaku penerima dana

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

BOSDA, tetapi tidak melakukan wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan sebagai pemberi dana BOSDA.

Implikasi dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini bisa memberikan tambahan literatur pada terkait dengan perhitungan biaya sekolah. Sedangkan dari sisi praktis, hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran dan pemahaman kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah bahwa dengan adanya perhitungan yang cermat dan akurat, kepala sekolah dan bendahara bisa mengetahui tingkat pendapatan yang diterima harus berada pada taraf tertentu dan biaya yang harus dikeluarkan pada taraf tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu, bisa mewawancarai pihak komite sekolah yang terdiri atas beberapa wali murid agar mendapatkan sudut pandang yang lebih beragam dan bisa menambah beberapa sekolah dari masing-masing perwakilan kabupaten/kota, sehingga tidak hanya sekolah yang di berada di wilayah Kabupaten Sleman, namun dalam cakupan lebih besar seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daftar Isi

- Abdullahi, S. R., Sulaimon, B. A., Mukhtar, I. S., & Musa, M. H. (2017). Cost-Volume-Profit Analysis as a Management Tool for Decision Making In Small Business Enterprise within Bayero University, Kano. *IOSR Journal of Business and Management*, 19(02), 40–45. <https://doi.org/10.9790/487x-1902014045>
- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 24–59. <https://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/view/27>
- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/jai.190187>

- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/ja.kpp.v2i1.1521>
- Andi, M., AR, M., & Usman, N. (2015). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI KABUPATEN PIDIE*. 3(4), 53–63.
- Anhari, M., Nugroho, T. R., & Rubiyanto. (2020). *Penerapan Activity Based Costing (ABC) Untuk Menghitung Biaya Satuan (UNIT COST) Pendidikan Di SMK AL Hikmah Sumobito*.
- Anugrah, Mulawarman, W. G., & Nurlaelah. (2022). School Operational Assistance Management to Lighten School Burden : A Literature Review. *Journal of Education and Learning Innovation*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.eduline1235>
- Bastomi, M., Sudarmiatin, & Hermawan, A. (2021). Cost Volume Profit (CVP) Analysis As a Profit Planning Tool At Lay Cang MSMEs. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 03(02).
- Basuni, N. A. A., & Halim, A. (2023). Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(1), 1–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v11i2.83652>
- Broadbent, J., & Laughlin, R. (1998). Resisting the “new public management”: Absorption and absorbing groups in schools and GP practices in the UK. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 11(4), 403–435. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/09513579810231439>

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.).
- DALCI, I. (2005). Activity-based cost-volume-profit analysis: another approach to break-even analysis. *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14, 227–244.
- Devi, Sihabudin, & Fauji, R. (2023). Analisis Break Even Point Dan Margin Of Safety Sebagai Alat Perencanaan Laba (Studi Pada B.O Coffee Shop Periode 2019-2021 Di Kab.Karawang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 2598–9944.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4853/http>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2095101>
- Gean, F., & Gean, V. (2015). *THE DESIRABILITY OF AN INTEGRATED LEARNING METHODOLOGY FOR ENRICHING CVP ANALYSIS*. 8(1), 2015.
- Hadiyanto, Famella, S., & Wiyono, B. B. (2019). The challenge of school operational assistance management in elementary schools. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(5), 421–432.
- Handayani, C. T., & Sukirno. (2016). Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 1, 1–12.
- Hassanah, A., & Daud, R. M. (2019). Analisis Cost Volume Profit Sebagai Alat Perencanaan Laba (Studi Kasus Pada Umkm Dendeng Sapi Di Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 190–214.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12232>
- Hayatunnida, J., & Shaleh. (2022). Analysis of Estimation of Education Unit Costs (Micro Approach and Macro Approach). *Journal of Educational Management Research*, 01.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods* (2E ed.).
- Kompas. (2023). *No Title*.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/02/menelisis-biaya-seragam-sekolah-negeri-yang-tinggi>
- Johnson, G., & Kiani, R. (2010). *Case Study: Alex Charter School*. 6(4).
- LE, O. T. T., TRAN, P. T. T., TRAN, T. Van, & NGUYEN, C. Van. (2020). Application of Cost-Volume-Profit Analysis in Decision-Making by Public Universities in Vietnam. *Journal of Asian Finance*, 7(6), 277–286.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no6>
- Lulaj, E., & Iseni, E. (2018). Role of Analysis CVP (Cost-Volume-Profit) as Important Indicator for Planning and Making Decisions in the Business Environment. *European Journal of Economics and Business Studies*, 4(August).
<https://doi.org/10.2478/ejes-2018-0043>
- Osahon, H., & Ph, O. (2014). *Financial Modeling in Non-Profit Organizations : The Cost-Volume-Profit Approach*. 5(6), 64–71.
- Phillips, P. A. (1994). Welsh Hotel : Cost-Volume- Profit Analysis and Uncertainty. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 6, 31–36.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/09596119410059236>
- Prihatin, S., Pardanawati, S. L., & Kusuma, I. L. (2022). Factors Affecting the Timeliness of Distribution of School Operational Assistance Funds (Bos Program) At Smk Muhammadiyah Delanggu in 2020/2021 Academic Year. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1244–1249.
<https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6262>
- Purwanto, E., & Watini, S. S. (2020). Analisis

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

ISSN: 2302-1500

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Harga Pokok Produksi
Menggunakan Metode Full Costing
Dalam Penetapan Harga Jual
(STUDI KASUS UNIT
USAHA REGAR FRUIT). *Journal
of Applied Managerial Accounting*,
4(2), 248–253.
<https://doi.org/10.30871/jama.v4i2.2402>

Putra, F. D. (2017). Pengaruh Volume
Penjualan Dan Biaya Produksi
Kalung Terhadap Laba Pada
Hidayah Shop Kuta- Badung. *Jurnal
Pendidikan Ekonomi
Undiksha*, 9(2), 462.
<https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i2.20127>